P-ISSN : 2541-545X
E-ISSN : 1907-3666

Volume 20, Nomor 2, (20 Desember 2025)
DOI : https://doi.org/10.46975/4h1eeb08

IMPLEMENTASI APLIKASI KEUANGAN PEMERINTAH DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN LAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT DI KANTOR CAMAT TEBAS

Misliana
Institut Bisnis dan Ekonomi Indonesia Pontianak, Indonesia
Email: mislianaliana37@gmail.com

Abstrack

The digitalization of bureaucracy in Indonesia has become a crucial strategy to establish more accountable, transparent, and efficient governance. However, the success of this transformation at the lowest level of government, such as sub-district offices (kecamatan), remains underexplored. This study aims to examine the implementation of government financial applications in financial administration and public services at the Tebas Sub-District Office, while also identifying the main challenges and adaptive strategies employed. This research adopts a descriptive qualitative approach, utilizing in-depth interviews, direct observation, and document analysis. Thematic analysis was applied to capture patterns related to implementation effectiveness, technical and structural barriers, and strategies for improvement. The research subjects consisted of sub-district officials directly involved in financial administration as well as community members as service recipients. Findings reveal that government financial applications, such as CMS Bank Kalbar and DJP Cortex, have accelerated financial transactions, improved documentation management, and strengthened accountability in financial reporting. Nevertheless, unstable internet infrastructure, frequent and confusing system updates, limited system integration, and low human resource capacity remain significant obstacles. Adaptive strategies included capacity-building through training, the use of standard operating procedures (SOPs), inter-agency coordination, and continuous technical support.

Keyword*: Bureaucratic Digitalization, Government Financial Application, Financial Administration, Public Service, Sub-District Office, E-Government.*

Abstrak

Digitalisasi birokrasi di Indonesia menjadi strategi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan efisien. Namun, keberhasilan transformasi ini pada level pemerintahan terendah, seperti kecamatan, masih jarang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi aplikasi keuangan pemerintah dalam penatausahaan keuangan dan layanan administrasi masyarakat di Kantor Camat Tebas, sekaligus mengidentifikasi kendala serta strategi adaptasi yang ditempuh. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui

P-ISSN : 2541-545X
E-ISSN : 1907-3666

wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik untuk menemukan pola-pola terkait efektivitas implementasi, hambatan teknis maupun struktural, serta strategi perbaikan. Subjek penelitian meliputi aparatur kecamatan yang terlibat dalam penatausahaan keuangan serta masyarakat pengguna layanan administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi keuangan pemerintah, seperti CMS Bank Kalbar dan DJP Cortex, telah membantu mempercepat transaksi, menertibkan dokumentasi, dan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan. Kendati demikian, keterbatasan infrastruktur internet, update aplikasi yang membingungkan, integrasi sistem yang belum optimal, serta kapasitas SDM yang terbatas menjadi tantangan utama. Solusi yang ditempuh meliputi peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, penggunaan SOP, koordinasi lintas instansi, serta dukungan teknis yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Digitalisasi Birokrasi, Aplikasi Keuangan Pemerintah, Penatausahaan Keuangan, Layanan Administrasi Masyarakat, Kecamatan, E-Government

PENDAHULUAN

Di tengah derasnya ombak transformasi digital, institusi pemerintahan kini tak lagi bertumpu pada pena dan kertas, melainkan lompatan teknologi. Di banyak negara berkembang, penyematan aplikasi keuangan pemerintah bukan sekadar upgrade sistem, melainkan "jembatan ke masa depan" yang menjanjikan transparansi dan efisiensi (Nurfadillah, 2025). Di Indonesia, digitalisasi semacam ini diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi landasan reformasi birokrasi agar lebih bersih, akuntabel, dan transparan (Dotulung, 2025).

Penelitian sebelumnya mengungkap tentang pembayaran digital mempercepat dan mengefisienkan pengelolaan keuangan publik. Penggunaan QRIS, sistem SP2D *online*, dan aplikasi SAKTI terbukti mampu mempersingkat alur transaksi, merapikan dokumentasi, serta menambah akuntabilitas fiskal (Wahyudi, 2024). Namun, transformasi digital ini sering berjalan pincang jika tidak ditopang kesiapan infrastruktur dan SDM. Kendala keamanan data, resistensi perubahan di lingkungan birokrasi, hingga integrasi sistem antarlembaga masih menjadi persoalan krusial (Sepriano dkk., 2023).

Di ranah *e-government* yang lebih luas, tantangan Indonesia meliputi kesenjangan digital, akses internet yang tidak merata, biaya layanan yang relatif tinggi, rendahnya literasi digital aparatur, serta budaya birokrasi yang cenderung resisten terhadap inovasi (Infantino dkk., 2021). Lebih jauh, studi di tingkat kecamatan menegaskan bahwa faktor penentu keberhasilan implementasi bukan hanya teknologi, melainkan kapasitas SDM dan komitmen pimpinan lokal. Tanpa dukungan kepala wilayah, proses digitalisasi bisa tersendat total meskipun perangkat teknis tersedia (Badii & Nurdin, 2025).

Celah kajian penelitian sejauh ini adalah fokusnya yang lebih menitikberatkan pada level nasional atau pemerintah daerah besar, sedangkan praktik implementasi di kecamatan dengan segala kompleksitas penatausahaan keuangan dan layanan administrasi masyarakat jarang disentuh secara serius. Hal inilah yang menjadi alasan pemusatan studi pada Kantor Camat Tebas. Sebagai entitas pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, kantor kecamatan menghadapi beban ganda yakni memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan

sekaligus mengurus layanan publik yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga, seperti pajak dan kependudukan.

Berdasarkan realitas tersebut, studi ini berangkat dari tiga pertanyaan kunci: pertama, bagaimana implementasi aplikasi keuangan pemerintah dalam penatausahaan keuangan di Kantor Camat Tebas? Kedua, bagaimana penerapan layanan administrasi masyarakat, khususnya pajak dan kependudukan, berlangsung di lingkungan tersebut? dan ketiga, apa saja kendala yang dihadapi, serta solusi apa yang ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

Tujuan dari penelitian ini adalah menghadirkan gambaran empiris tentang bagaimana digitalisasi birokrasi berjalan di "garda terdepan" pemerintahan. Secara akademis, studi ini diharapkan menambal kekosongan literatur pada level mikroskala, sementara secara praktis, rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi pijakan bagi perbaikan tata kelola keuangan dan pelayanan publik di kecamatanlain. Dengan demikian, naskah ini tidak hanya merekam kisah lokal di Tebas, melainkan juga menjadi cermin reflektif atas perjalanan digitalisasi pemerintahan di bagian terkecil.

TINJAUAN PUSTAKA

SPBE dan *Digital Governance* di Indonesia

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi inti reformasi birokrasi modern. Menurut Dewi (2025), SPBE muncul sebagai pilar *good governance*, mempercepat administrasi, memangkas biaya, dan meningkatkan transparansi pelayanan di pemerintahan daerah (Dewi, 2025). Namun, penerapannya sering kali terhambat oleh interoperabilitas sistem yang rendah, kesiapan SDM yang belum merata, dan kesenjangan akses teknologi antar wilayah (Kencono dkk., 2024). Kendala utamanya antara lain kurangnya infrastruktur TIK, budaya kerja birokrasi yang konservatif, serta lemahnya kepemimpinan dalam mendorong adopsi SPBE (Kencono dkk., 2024). Mereka merekomendasikan peningkatan akses, pelatihan SDM, dan integrasi data melalui Pusat Data Nasional

Studi lain juga menyoroti *model collaborative governance* sebagai kunci keberhasilan implementasi SPBE. Kabupaten Polewali Mandar, misalnya, menjadi contoh *best practice* karena komitmen pimpinan kuat, koordinasi antar OPD, dan budaya perbaikan berkelanjutan (Ahad & Barsei, 2023). Secara global menegaskan bahwa inovasi birokrasi melalui SPBE terutama untuk pembangunan *smart city* memerlukan transformasi teknologi, organisasi, dan regulasi. Mereka menyoroti bahwa komponen penting adalah desain sistem, kesiapan lembaga, dan koordinasi baik internal maupun eksternal (Fahmi dkk., 2021).

Implementasi Aplikasi Keuangan Pemerintah

Kajian umum menunjukkan bahwa aplikasi keuangan seperti SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dan SP2D *Online* memainkan peran penting dalam modernisasi tata kelola keuangan publik. Studi kasus di KPPN Semarang I mengungkap bahwa penerapan SAKTI telah berjalan dengan baik, mendukung kelancaran tugas-tugas utama seperti penyusunan laporan dan pelaksanaan anggaran dengan efektif (Prabowo, 2017).

Tinjauan sistematis terhadap aplikasi *e-government* berbasis *website* oleh Williem (2024) menyimpulkan bahwa aplikasi semacam ini secara umum cukup efektif dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan keterbukaan informasi. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur TIK, anggaran, kompetensi SDM, serta pemahaman dan partisipasi masyarakat. Lebih spesifik, penerapan SAKTI sebagai bagian dari sistem SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) menunjukkan bahwa komponen digitalisasi keuangan perlu mendukung seluruh siklus keuangan dari penganggaran hingga pertanggungjawaban dengan memanfaatkan basis data tunggal (*single database*). Ini sangat membantu dalam pengelolaan data yang lebih efisien dan akurat (Septianti dkk., 2022).

Walau demikian, efektivitas dari aplikasi digital ini tidak dapat dicapai hanya lewat teknologi. Kesiapan SDM yang memahami sistem, ketersediaan sarana prasarana, serta dukungan anggaran menjadi penentu kunci. Jika salah satu dari elemen ini tidak terpenuhi, potensi efisiensi dan transparansi yang ditawarkan bisa saja hanya menjadi potensi semata.

e-Government dan Layanan Administrasi di Tingkat Kecamatan

Penelitian yang secara langsung membahas implementasi *e-government* di tingkat kecamatan memang masih terbatas. Salah satu kajian penting adalah oleh Ardiyati (2022), yang mengevaluasi konsep Sedayu *Smart District* di Kecamatan Sedayu (Kabupaten Bantul). Temuannya cukup tajam: "Implementasi Sedayu Smart District …" secara perencanaan, koordinasi antar-stakeholder, serta monitoring dan evaluasi kurang terlaksana dengan baik sehingga pelaksanaannya bersifat sporadis dan sangat bergantung pada kepemimpinan lokal".

Beberapa aspek yang melemahkan keberlanjutan program ini antara lain minimnya struktur organisasi pendukung, alokasi anggaran yang tidak memadai, serta lemahnya mekanisme evaluasi secara sistematik. Kondisi tersebut menyebabkan program *e-government* menjadi tergantung pada personel tertentu yang bila terjadi pergantian atau kendala lain, program bisa langsung berhenti berfungsi. Temuan ini menggarisbawahi bahwa inovasi teknologi tanpa fondasi kelembagaan dan tata kelola yang kuat hanya bersifat sementara. Sebagai perbandingan, studi mengenai aplikasi *e-government* di level desa, seperti OpenSID, menunjukkan potensi positif ketika terdapat pedoman teknis, pelatihan yang memadai, dan dukungan regulasi. OpenSID dipercaya dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi desa melalui kontrol data yang terbuka dan mandiri (Subakti & Rahaju, 2025). Namun, implementasinya juga menemui hambatan seperti keterbatasan anggaran untuk fitur premium dan belum adanya instruksi yang memadai dari pemerintah daerah. Hal ini mengajarkan bahwa meskipun teknologi tersedia, dukungan kebijakan dan sumber daya tetap menjadi penentu efektivitas.

Ringkasnya, kajian teori ini menegaskan bahwa di level kecamatan, tempat administratif yang menjadi penghubung utama antara kebijakan kabupaten dan kebutuhan warga. Adopsi *e-government* menghadapi tantangan unik. Keberhasilan implementasinya tidak hanya terkait teknologi, tapi juga kapasitas kelembagaan, komitmen pimpinan lokal, serta struktur koordinasi antar instansi. Fokus pada teknologi semata tanpa memperkuat aspek kelembagaan dan regulasi akan membuat digitalisasi pelayanan tetap rapuh dan tidak berkelanjutan.

P-ISSN : 2541-545X
E-ISSN : 1907-3666

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi aplikasi keuangan pemerintah dalam proses penatausahaan keuangan dan layanan administrasi masyarakat di Kantor Camat Tebas. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami dinamika penerapan aplikasi keuangan secara kontekstual, termasuk hambatan, strategi adaptasi, serta dampaknya terhadap efektivitas layanan publik. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif karena penelitian tidak bermaksud menguji hipotesis (Ramdhan, 2021). Melainkan memotret fenomena penggunaan aplikasi keuangan pemerintah dalam konteks nyata. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu menyajikan deskripsi yang kaya mengenai praktik pengelolaan keuangan daerah serta transformasi layanan administrasi masyarakat melalui teknologi digital.

Subjek penelitian mencakup aparatur kecamatan yang terlibat langsung dalam penatausahaan keuangan, termasuk bendahara, staf keuangan, serta pejabat struktural terkait. Selain itu, masyarakat pengguna layanan administrasi juga dilibatkan untuk memperoleh perspektif dari sisi penerima manfaat, sehingga data yang diperoleh tidak hanya merepresentasikan sudut pandang penyelenggara, tetapi juga pengguna layanan.

Pengumpulan data dilakukan dengan memadukan wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi (Putra & Simanjuntak, 2025). Wawancara diarahkan kepada aparatur kecamatan dan masyarakat untuk menggali pengalaman, persepsi, serta kendala dalam penggunaan aplikasi keuangan pemerintah. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung praktik penatausahaan keuangan dan layanan administrasi, khususnya saat aplikasi digunakan dalam pencatatan transaksi, penyusunan laporan, maupun pelayanan publik. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menelaah laporan keuangan, arsip administrasi, serta panduan teknis aplikasi keuangan yang digunakan di lingkungan kecamatan. Proses pengumpulan data dilaksanakan secara sistematis, dimulai dari identifikasi informan kunci berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses penatausahaan, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan selama beberapa minggu. Tahapan ini penting agar data yang diperoleh tidak parsial, melainkan komprehensif dan mendalam.

Analisis data menggunakan analisis tematik dengan menekankan pada pengkodean data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menemukan pola makna yang relevan dengan fokus penelitian (Adelia dkk., 2023). Tema-tema yang muncul, seperti efektivitas penggunaan aplikasi, peningkatan transparansi, kendala teknis, kapasitas sumber daya manusia, serta dampaknya terhadap kualitas layanan masyarakat, kemudian dipetakan dan dianalisis secara mendalam. Proses analisis dilakukan secara berulang (iteratif) hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBASAHAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini dirangkum berdasarkan tiga fokus utama: implementasi aplikasi keuangan, kendala yang muncul, serta upaya yang ditempuh untuk mengatasinya.. Hal ini membuat

P-ISSN : 2541-545X
E-ISSN : 1907-3666

temuan yang tersaji tidak semata hasil observasi, tetapi juga pengalaman praktis yang memperkaya deskripsi. Rangkuman temuan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Temuan Penelitian

Implementasi Aplikasi Keuangan	Kendala	Solusi/Upaya
1. Aplikasi digunakan untuk transaksi rutin (pembayaran gaji honorer, belanja, penyetoran pajak via CMS Bank Kalbar). 2. Input & verifikasi data keuangan, termasuk yang dikerjakan juga oleh mahasiswa magang. 3. Pembuatan laporan keuangan (LRA, Neraca, Arus Kas). 4. Pengelolaan ID Billing pajak melalui DJP Cortex, dimana mahasiswa magang turut membantu proses rekapitulasi. 5. Penerimaan berkas E-KTP serta pelayanan administrasi masyarakat.	1. Internet sering tidak stabil, juga dirasakan langsung oleh mahasiswa magang saat input data. 2. Update aplikasi yang kerap menyulitkan aparatur dan peserta magang dalam adaptasi. 3. Integrasi antar-sistem (SIPD RI, SIMAKDA, CMS Bank, DJP Cortex) belum optimal. 4. Keterbatasan SDM dalam penguasaan aplikasi, termasuk perlunya bimbingan ekstra bagi peserta magang. 5. Risiko error/gangguan teknis yang memperlambat proses kerja.	1. Upgrade jaringan internet (penambahan Mbps, penggunaan LAN). 2. Pelatihan & peningkatan kompetensi SDM, termasuk melibatkan mahasiswa magang dalam praktik langsung. 3. Koordinasi lebih intensif dengan OPD/SKPD terkait. 4. Penyusunan SOP & panduan operasional yang juga dijadikan pegangan bagi mahasiswa magang. 5. Penyediaan dukungan teknis untuk perawatan dan troubleshooting aplikasi.

Sumber: Telaah Penulis, 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi keuangan pemerintah di Kantor Camat Tebas telah berjalan cukup sistematis, meliputi pencatatan transaksi rutin, penyusunan laporan, hingga pelayanan administrasi masyarakat. Temuan ini selaras dengan kajian Williem (2022) yang menekankan bahwa efektivitas *e-government* sangat ditentukan oleh kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, dan dukungan kelembagaan. Pada kasus Tebas, aplikasi penatausahaan keuangan seperti CMS Bank Kalbar dan DJP Cortex tidak hanya mempercepat alur transaksi, tetapi juga memperkuat fungsi pengawasan melalui jejak digital yang lebih tertata.

Namun, kendala teknis dan struktural masih menjadi penghalang signifikan. Keterbatasan jaringan internet yang sering tidak stabil memperlihatkan adanya kesenjangan digital di level kecamatan. Hal ini sejalan dengan temuan Subakti & Rahaju (2025) yang mengungkapkan bahwa implementasi aplikasi desa berbasis *online* masih terkendala oleh infrastruktur dan literasi digital yang rendah. Selain itu, update aplikasi yang kerap terjadi tanpa kesiapan teknis justru menambah beban adaptasi aparatur, termasuk mahasiswa magang yang terlibat langsung dalam proses input data. Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya soal ketersediaan sistem, tetapi juga kemampuan adaptasi aktor lokal di dalamnya.

Dari sisi solusi, strategi peningkatan kapasitas SDM dan koordinasi antarinstansi terbukti menjadi kunci adaptasi. Aparatur kecamatan berupaya menutup celah teknis melalui pelatihan internal dan penggunaan SOP yang lebih jelas, sementara dukungan teknis eksternal dari OPD terkait menjadi instrumen penting untuk menjaga kesinambungan sistem. Kondisi ini

memperkuat argumen Ardiyati (2023) dalam studinya tentang Sedayu Smart District, bahwa keberhasilan *e-government* di tingkat kecamatan sangat tergantung pada koordinasi dan komitmen pimpinan lokal. Pada konteks Tebas, dukungan pimpinan dan keterlibatan lintas SKPD terbukti membantu menjaga kelancaran layanan meskipun masih menghadapi keterbatasan struktural.

Menariknya, keterlibatan mahasiswa magang memberi dimensi pembelajaran praksis dalam implementasi ini. Mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi turut serta dalam input data, penyusunan laporan, dan pendampingan layanan administrasi. Posisi ini memberi perspektif bahwa magang dapat menjadi sarana "*stress test*" bagi sistem digital birokrasi: ketika pemula pun mampu menjalankan aplikasi (meski dengan kendala), maka aplikasi tersebut relatif mudah diakses; sebaliknya, jika mahasiswa kesulitan, hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan *usability*. Dengan demikian, penelitian ini menambahkan kontribusi mikro pada literatur *e-government*, yaitu menyoroti pengalaman implementasi di tingkat kecamatan dengan menekankan peran pembelajaran institusional melalui program magang.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa digitalisasi keuangan pemerintah di level kecamatan merupakan proses hibrid: di satu sisi mempercepat dan mengefisienkan tata kelola, tetapi di sisi lain menuntut kesiapan infrastruktur, SDM, serta kepemimpinan lokal yang adaptif. Implikasi akademisnya adalah perlunya kajian lebih lanjut mengenai transformasi digital pada level pemerintahan mikro, yang selama ini masih jarang disentuh. Implikasi praktisnya, temuan dari Tebas dapat menjadi pijakan bagi kecamatan lain untuk mengantisipasi kendala teknis dan memperkuat strategi adaptasi SDM dalam mengoperasikan aplikasi keuangan pemerintah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi keuangan pemerintah di Kantor Camat Tebas telah berjalan relatif efektif dalam mendukung penatausahaan keuangan dan layanan administrasi masyarakat. Aplikasi seperti CMS Bank Kalbar dan DJP Cortex mampu mempercepat transaksi, meningkatkan ketertiban dokumentasi, serta memperkuat akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan mahasiswa magang memperlihatkan bahwa sistem ini dapat dioperasikan secara praktis, meskipun tetap memerlukan pendampingan dan pembiasaan. Meskipun demikian, sejumlah kendala masih menghambat optimalisasi, antara lain ketidakstabilan jaringan internet, update aplikasi yang seringkali membingungkan, keterbatasan SDM, serta lemahnya integrasi antar sistem. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyusunan SOP, koordinasi lintas instansi, serta dukungan teknis untuk pemeliharaan aplikasi. Strategi adaptasi ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital di tingkat kecamatan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, komitmen pimpinan lokal, dan keberlanjutan koordinasi antar lembaga.

Secara akademis, penelitian ini menutup celah literatur yang selama ini lebih banyak berfokus pada implementasi *e-government* di tingkat nasional dan daerah besar, dengan menghadirkan gambaran mikro dari praktik di kecamatan. Secara praktis, temuan ini memberi rekomendasi bagi kecamatan lain untuk memperkuat kapasitas SDM, memastikan kesiapan

teknis, serta menjadikan program magang sebagai sarana pembelajaran institusional dalam menguji keberfungsian aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adelliani, N., Sucirahayu, C. A., & Zanjabila, A. R. (2023). *Analisis tematik pada penelitian kualitatif*. Penerbit Salemba.

Ahad, M. P. Y., & Barsei, A. N. (2023). Collaborative Governance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice Dari Pemerintah Daerah Di Indonesia: Collaborative Governance In The Implementation Of Electronic-Based Governance Systems: Best Practices From Local Governments In Eastern Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, *13*(01), 52-74. https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.236

Ardiyati, A. (2021). Analisis Dampak Sosial Kebijakan Sedayu Smart Distrik Terhadap Pengembangan Smart Society. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, *3*(2), 86-96. https://dx.doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.22

Badii, R. R., & Nurdin, N. (2025). *Implementasi kebijakan e-government dalam pelayanan publik di Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah* (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAH DALAM NEGERI).

Dewi, Y. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sebagai Pilar Good Governance: Refleksi Tata Kelola Pemerintah Daerah. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, *23*(1), 53–63. https://doi.org/10.46730/jiana.v23i1.8247

Dotulung, M. T. P. (2025). Kajian Yuridis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(4), 4630-4645. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20729

Fahmi, A., Perdanaputra, D., & Komaria, S. (2021). Bureaucratic Innovation in the Smart City Era: An Analysis of the Implementation of the Electronic Based Government System (SPBE). *Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS)*, *6*(2), 104-110. https://doi.org/10.24967/jshs.v6i2.4300

Infantino, M., Manfredi, M., Albesa, R., Grossi, V., Lari, B., Benucci, M., ... & Mahler, M. (2021). Critical role of pre-analytical aspects for the measurement of circulating calprotectin in serum or plasma as a biomarker for neutrophil-related inflammation. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)*, *59*(8), e317-e321. http://dx.doi.org/10.1515/cclm-2021-0172

Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(2), 1498-1506. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519

Nurfadillah, A. (2025). Penerapan E-Government pada Sektor Pelayanan Publik (Studi Kasus Aplikasi OpenSID di Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka). *PENA Bisnis dan Governansi Publik Adaptif*, *1*(1), 72-85. https://www.ejurnal.teraskampus.id/index.php/bangsa/article/view/256

Prabowo, N. T. (2017). Analisis sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) dengan pendekatan Technology Acceptance Model. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *2*(2), 55-66. http://dx.doi.org/10.25047/asersi.v3i1.3901

Putra, I. M., & Simanjuntak, H. (2025). Cultural Symbolism in Regional Song Lyrics: Enhancing the Resilience of the Dayak Kanayatn Language. *IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature*, *13*(2), 3459-3478. https://doi.org/10.24256/ideas.v13i2.5871

Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Sepriano, S., Hikmat, A., Munizu, M., Nooraini, A., Sundari, S., Afiyah, S., ... & Indarti, C. F. S. (2023). *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Septianti, T. G., Wicaksana, K. A. B., & Ayuni, N. W. D. (2022). *Analisis Sistem Informasi dan Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi SAKTI pada Balai Wilayah Sungai Bali Penida* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).

Subakti, M. A., & Rahaju, T. (2025). Implementasi program sistem informasi desa Siap (OpenSID) di Desa Siwalan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik, 2*(2), 115–134. https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i2.691

Wahyudi, A. (2024). *Implementasi Sakti Full Modul Pada Laporan Pertanggungjawaban Satuan Kerja di KPPN Palu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).

Williem, A. (2024). *LITERATURE REVIEW: Efektivitas Aplikasi E-Government Berbasis Website***.** Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)**,** Vol. 7 No. 3, pp. 599–605. http://dx.doi.org/10.31539/intecoms.v7i3.9592